

PERAN DAN FUNGSI SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM PENCEGAHAN FRAUD PADA PERGURUAN TINGGI X

Muhammad Asim Asy'ari
Prasetyono
Bambang Haryadi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang Po. Box. 02 Kamal, Bangkalan-Madura
Email: asyim_law@yahoo.com; prasetyounijoyo@yahoo.com; haryadilee@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and evaluate of the role and function of Internal Control Unit (SPI) PTN X on the prevention of fraud. The method of this research is qualitative approach with using case study. The unit analysis of this research is the internal control unit in University X. The analyze research used descriptive analysis.

The results show that the role and function of SPI has not been preventing fraud. This is because the process of supervision and auditing done by SPI have not led to five pillars of internal control recommended by COSO. Audit conducted by SPI is still compliance test and still financial management risk based. The low environment control and the lack of consciousness of management against the role and function of SPI causes SPI does not capable to prevent fraud. Some other factors that cause SPI could not reach its maximum function are: the role conflict of SPI officers, budget that has not been independently managed, and the SPI position in OTK that has not been providing bargaining power and adequate control accessibility.

Keywords: Internal Audit Unit, Fraud, Role and Function.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan dalam mengembangkan, dan mentransformasi pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan tata kelola yang baik untuk peningkatan dan kemajuan perguruan tinggi.

Tata kelola organisasi yang baik (*good corporate Governance*) dalam pengelolaan organisasi menjadi sebuah tuntutan dan harga mati. *Good corporate Governance* (GCG) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006 terdiri: (1) transparansi (*transparency*), (2) akuntabilitas, (3) tanggung jawab, (4) independensi, serta (5) kewajaran dan kesetaraan. Salah satu bagian dalam praktik GCG adalah adanya sistem pengendalian *intern* yang di dalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, laporan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam organisasi. Untuk itulah pentingnya pengendalian *intern* yang diharapkan dapat mendorong terciptanya GCG pada organisasi.

Undang-undang yang mengatur tentang pengawasan *intern* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern*. Untuk melaksanakan PP Nomor 60 tahun 2009, maka Departemen Pendidikan Nasional pada waktu itu mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Depdiknas.

Perguruan Tinggi Negeri X sebagai bagian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjalankan amanat Pemendikas Nomor 16 tahun 2009 untuk membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI). Melalui SK Rektor Nomor 028/H46/2009, di bentuk Tim Auditor Internal Perguruan Tinggi Negeri X yang menjadi awal lahirnya SPI Perguruan Tinggi Negeri X. Baru pada tahun 2011, dengan terbitnya SK Nomor 016/H46/2010 Tim Auditor Internal Perguruan Tinggi Negeri X diubah namanya menjadi Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perguruan Tinggi Negeri X. Keberadaan SPI berfungsi untuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri X. Sejalan dengan Permendiknas No. 47 Tahun 2011, tugas SPI mencakup seluruh proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain terhadap tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan SPI diharapkan menjadi unit strategis, partner atau mitra kerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri X untuk mendorong peningkatan mutu organisasi. Keberadaan SPI sebagai salah satu alat dalam melakukan pengawasan dalam menjamin tujuan dan aktivitas manajemen berjalan dengan baik dan bebas dari *fraud*. Belum maksimalnya peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh SPI dapat dilihat dari masih banyaknya *fraud* yang dihadapi oleh perguruan tinggi negeri dalam pengelolaannya.

Hasil audit BPK sepanjang 2008-2010 di Universitas Indonesia terkait pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan total pemborosan keuangan negara sebesar Rp 625.624.105, dan kelebihan bayar Rp 2,675,091,222 serta berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 45 miliar. Hasil audit BPK periode 2008-2010 di UGM ditemukan sembilan permasalahan dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan hasil audit, total kelebihan bayar adalah Rp 2,545,889,713, dan indikasi kerugian Negara (www.itoday.co.id).

Kasus-kasus korupsi pada lingkungan perguruan tinggi seperti korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2010 pada 16 perguruan tinggi (Tempo, edisi 09 Nopember 2012) menambah daftar hitam praktik *fraud* di perguruan tinggi. Dalam Pencegahan *fraud* fonomena-fonomena *fraud* yang terjadi pada perguruan tinggi di atas mengindikasikan peran dan berfungsi SPI pada perguruan tinggi belum maksimal dalam mencegah praktik terjadinya *fraud*. Untuk itulah peran dan fungsi SPI pada PT perlu dioptimalkan dengan meningkatkan komitmen dari pimpinan.

Perguruan Tinggi Negeri X memang belum terbukti adanya praktik *fraud* yang terjadi. Namun demikian adanya temuan Irjen kemendikbud yang terus berulang setiap tahunnya (tabel 2) menjadi gambaran awal peran dan fungsi SPI di Perguruan Tinggi Negeri X belum optimal.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi peran dan fungsi SPI Perguruan Tinggi Negeri X dalam pencegahan *fraud*.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pengendalian *Intern*

Dalam manajemen, evaluasi dan pegendalian adalah komponen penting untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai organisasi terlaksana dengan baik. Evaluasi dan pengendalian dapat dilaksanakan sendiri oleh manajemen. Evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen berupa pengendalian *intern*. Pengendalian *intern* merupakan sistem dan alat yang dirancang sedemikian rupa oleh manajemen untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai berjalan dengan maksimal dan menghindarai adanya kemungkinan penyelewengan maupun penyimpangan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Pengendalian *intern* sendiri diistilahkan dengan pengawasan *intern* (PP 60 Tahun 2008). Pengawasan *intern* atau *internal control* (Intosai, 2009) adalah proses yang integral oleh manajemen dan dirancang untuk mengatasi risiko serta memberikan keyakinan memadai bahwa

tujuan organisasi telah tercapai. Salah satu bentuk pelaksanaan *internal control* dalam organisasi adalah adanya internal audit. *The Institute of Internal* mendefinisikan *internal auditing* (2009), sebagai sebuah bentuk pemeriksaan *intern* yang independen dan dilaksanakan terus-menerus yang bertujuan untuk memeriksa serta mengevaluasi aktivitas organisasi.

Peran dan Fungsi Internal audit

Pergeseran filosofi *internal auditing* dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi peran profesi auditor internal sebagai *watchdog* menjadi konsultan dan mitra bagi manajemen. Perubahan paradigma peran internal audit membawa konsekuensi terhadap pendekatan audit lebih bersifat proaktif serta audit lebih difokuskan pada *risk based audit*, sehingga auditor internal berperan dalam identifikasi dan analisis risiko aktivitas yang organisasi. Peran internal audit bagi manajemen (YPIA, 2008: 11) adalah:

1. Memonitor aktivitas

Internal audit membantu memonitor aktivitas manajemen dengan menyiapkan program kerja dan jadwal audit oleh internal auditor.

2. Penilaian dan pengendalian risiko.

Internal auditor harus menjamin bahwa risiko dan pengendalian dalam aktivitas manajemen berjalan dengan maksimal. Pengendalian risiko merupakan upaya untuk efektivitas dan efisiensi aktivitas manajemen

3. Memvalidasi laporan manajemen

Internal auditor harus melakukan revidi laporan manajemen yang menjamin dan meyakinkan tentang akurasi, ketepatan dan penyajian laporannya sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Membantu proses pengambilan keputusan

Dalam pengambilan keputusan operasi yang dilakukan manajemen, internal auditor akan membantu dengan mengevaluasi dampak keputusan tersebut serta risiko yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.

5. Mereviu kegiatan

Melakukan revidi kegiatan dan aktivitas manajemen merupakan salah satu peran dan fungsi internal auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

6. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan.

Rekomendasi dari internal auditor dalam rangka perbaikan manajemen seperti dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan pertanggungjawaban maupun evaluasi dan pengendalian.

SPI PT X sebagai internal audit tentunya harus melakukan konsep yang dikeluarkan oleh YPIA tentang peran dan fungsi internal audit. Secara spesifik peran dan fungsi SPI PT X mengacu pada Permendiknas No. 47 Tahun 2011 adalah melakukan pengawasan non akademik meliputi: a) Penyusunan program pengawasan; b) Pengawasan kebijakan dan program; c) Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; d) Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; e) Pendampingan dan revidi laporan keuangan; f) Pemberian saran dan rekomendasi; g) Penyusunan laporan hasil pengawasan; h) Evaluasi hasil pengawasan.

Fraud

Statement on Auditing Standards No. 99 mendefinisikan *fraud* sebagai “*an intentional act that result in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit.* Menurut Black’s Law Dictionary (ACFE, 2011) *fraud* adalah semua macam yang dipikirkan manusia dan diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah, licik atau tersembunyi, dan tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.

Beberapa katagori *fraud* (Singleton and Singleton, 2010: 40) yaitu:

1. *Fraud as a crime*

Kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup semua aneka kecerdikan manusia yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan pemalsuan atau salah saji. Tidak ada aturan yang detail mengenai batasan *fraud* karena mencakup kejutan, trik, licik, dan cara-cara tidak adil serta menipu. Satu-satunya batas untuk mendefinisikana *fraud* adalah adalah perbuatan tidak jujur.

2. *Corporate fraud*
Setiap kecurangan yang dilakukan oleh, untuk, atau terhadap sebuah perusahaan bisnis
3. *Management fraud*
Merupakan penyajian yang tidak benar terkait kinerja perusahaan untuk memperoleh keuntungan
4. *Layperson's definition of fraud.*
Kecurangan bagi definisi orang awam adalah ketidak jujuran dalam bentuk penipuan yang disengaja atau sengaja membuat kesalahan dari fakta yang bersifat material.
Dari berbagai pengertian *fraud* di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fraud* adalah perbuatan mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain baik dengan menyembunyikan ataupun penyajian fakta yang tidak benar serta dilakukan dengan cara sembunyi.

Peran Internal Audit (SPI) Dan Pencegahan *Fraud*

Internal auditor memiliki peran yang sangat strategis terkait pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Peran internal auditor sebagai mitra kerja manajemen dalam mengawasi, memantau dan menganalisa aktivitas manajemen serta tempat *sharing* dan konsultasi merupakan kunci penting dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Perubahan paradigma internal auditor memainkan peran dan fungsinya dari paradigma lama ke paradigma baru (tabel 1) akan melahirkan wajah baru internal auditor untuk lebih proaktif sehingga nantinya mampu mendeteksi sedini mungkin jika terjadi *fraud*.

Perubahan paradigma lama internal audit ke paradigma baru diharapkan akan mendesain semakin efektifnya kegiatan internal audit. Karena dengan semakin efektifnya internal audit maka akan sangat membantu manajemen dalam mencegah terjadinya *fraud*. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan oleh internal audit dalam mendeteksi *fraud* (IIA, 2009: 2):

1. Pengawasan manajemen audit terhadap *fraud*.
2. Audit untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud* dengan menganalisis risiko terbesar. Hal ini bertujuan untuk mencari indikator *fraud* dalam organisasi yang nantinya dapat dibuatkan sistem pengendalian *fraud*.
3. Mempertimbangkan kemungkinan terjadinya *fraud* dalam kegiatan audit.
4. Bertugas memberikan konsultasi untuk membantu manajemen mengidentifikasi dan menilai risiko dan menentukan kecukupan proses pengendalian lingkungan bisnis, usaha baru, atau aplikasi IT.

Peran internal audit dalam mendeteksi setidaknya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Coram. et al., (2006) bahwa organisasi dengan fungsi audit internal lebih mungkin untuk mendeteksi dan melaporkan *fraud* jika dibandingkan mereka yang tidak memiliki fungsi internal audit. Burnaby. et al (2011) mengisyaratkan hal yang sama tentang pentingnya internal auditor dalam mendeteksi *fraud*. Amrizal (2007) menyebutkan bahwa penempatan struktur internal kontrol yang baik akan memaksimalkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat cara serta prosedur yang harus dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Somantri (2005) mendefinisikan metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan fenomena sosial apa yang sedang diteliti. Indriantoro dan Bambang (1999: 3) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara-cara atau prosedur yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuannya.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paradigma kualitatif. *Qualitative research* (Basrowi dan Sukidin, 2002: 1) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Selain itu, penelitian kualitatif berupaya mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif. Chariri (2009) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan

dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya..

Basrowi dan Sukidin (2002: 3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan subjektivisme bersifat makro sampai sangat mikro dengan kajian yang mendalam, melihat aspek historis dan kompleksitasnya penelitian. Dari berbagai pengertian tentang penelitian kualitatif diatas dapat ditarik benang merah bahwasanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami sesuatu secara menyeluruh dari sebuah objek yang tidak bisa di kuantitatifkan dan berusaha menggambarkan kondisi objek itu apa adanya. Indriantoro dan Bambang Supomo (2002: 12) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas dan atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang naturalisme dimana peneliti sebagai instrumen utama untuk mengeksplorasi, memahami, serta menganalisa fakta dan data yang nampak untuk mengungkapkan makna sosial, pola pikir, serta alasan dibalik tindakan para pelaku sosial. Metode kualitatif menjadi pilihan oleh peneliti sebagai upaya untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari objek penelitian.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus di anggap sebagai pilihan yang paling tepat karena dalam penelitian studi kasus merupakan suatu model penelitian kualitatif tentang individu atau unit sosial yang terperinci, komprehensif, inten dan mendalam terhadap fonomena-fonomena yang di teliti (Herdiansyah, 2010: 76).

Mulyana (204: 2001) menjelaskan studi kasus merupakan uraian dan penjelasan yang konprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, kelompok, atau organisasi dalam situasi sosial dengan berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Dalam penelitian studi kasus, ciri yang sangat menonjol adalah adanya batasan dalam hal kasus yang diangkat (subjek penelitian, kejadian, aktivitas). Oleh karena itu, dalam penelitian studi kasus peneliti harus betul-betul memahami secara mendalam terhadap objek penelitian. Dalam upaya memahami sebuah fenomena, seorang peneliti harus memiliki pemahaman yang cukup tentang objek yang akan ditelitinya (Fikri *et., al.*: 2011). Peneliti menganggap bahwa pemahaman terhadap fonomena tentang objek penelitian sudah terpenuhi karena peneliti merupakan bagian dari objek penelitian.

Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data subyek (*self-report data*). Data subyek (*self-report data*) adalah data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi responden penelitian (Indriantoro dan Bambang, 2002: 145). Data subyek bersumber dari data primer yang yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui wawancara kepada informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research question*) kepada informan. *Research question* yang diberikan kepada informan berkenaan peran dan fungsi SPI khususnya dalam pencegahan *fraud*. Dalam tradisi penelitian kualitatif, wawancara merupakan poin penting yang tidak dapat dipisahkan dalam metode pengumpulan data. Bentuk wawancara yang digunakan adalah *depth interview*. *Depth interview* ini merupakan upaya memahami fonomena sosial yang diteliti.

Selain data subyek (*self-report data*), maka data dokumenter (*documentary data*) merupakan bagian penting yang tidak bisa di lepaskan dalam penelitian ini. Data dokumenter yang dimaksud berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian baik berupa laporan, notulensi rapat, surat keputusan rektor maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan subjek penelitian.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti juga menggali sumber data melalui *survey observasion*. *survey observasion* yang dimaksud adalah pengamatan partisipan (*participant-observer*). Sekaran (2006; 103) menjelaskan bahwa pengamatan partisipan yang dilakukan oleh peneliti jika peneliti memainkan peran, terlibat atau menjadi bagian subyek penelitian. Peneliti sejauh ini sangat terlibat dengan subyek penelitian karena merupakan staf dari Satuan

Pengawasan Intern Perguruan Tinggi Negeri X dan menjadi bagian serta terlibat langsung dalam kegiatan keseharian Satuan Pengawasan Intern Perguruan Tinggi Negeri X.

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2009: 221), penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Informasi yang maksimum tersebut dapat capai jika peneliti tepat dalam pengambilan informasi kepada informan. Kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan informan untuk mendapatkan informasi yang maksimal adalah informan merupakan informan kunci (*key informan*) terhadap objek penelitian. Bungin (2003: 54) memberikan 5 kriteria teknik pengambilan informan sebagai *key informan* yaitu:

1. Subjek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktivitas yang menjadi informasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kemampuannya dalam memberikan informasi.
2. Subjek masih aktif dalam lingkup yang menjadi perhatian peneliti
3. Subjek cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dilakukan wawancara.
4. Subjek dalam memberikan informasi tidak cenderung di olah atau dipersiapkan terlebih dahulu
5. Subjek tergolong "asing" dengan penelitian sehingga peneliti tertantang untuk menggali sebanyak mungkin informasi mengenai subjek.

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan kriteria-kriteria tertentu yang mengetahui dan memahami tentang tugas dan tanggungjawab serta apa yang telah dilakukan SPI selama ini. Dari uraian tersebut informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah anggota SPI karena anggota SPI pelaku dalam pelaksanaan audit dan pengawasan yang dilakukan SPI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas Gambaran SPI PT X

Satuan Pengawasan Intern Perguruan Tinggi Negeri X (SPI PT X) lahir sebagai amanat Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Awal keberadaannya, SPI PT X bernama Internal Auditor yang dibentuk berdasarkan SK Rektor Nomor 028/H46/2009 dengan beranggotakan 5 orang. Kelima anggota internal auditor tersebut empat orang dengan latar belakang akuntansi dan satu orang hukum. Satu tahun kemudian, internal auditor diubah menjadi Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) tepatnya tanggal 1 Maret 2010 melalui SK Rektor Nomor 016/H46/2010. Perubahan internal auditor juga di ikuti dengan perubahan jumlah anggotanya yaitu dari lima orang menjadi tujuh orang. Komposisi anggota SPI terdiri dari empat orang berlatar belakang akuntansi, satu orang berlatar belakang hukum dan dua orang berlatar belakang pertanian. Oleh karena itu, internal auditor merupakan cikal bakal terbentuknya SPI.

Selang satu tahun kemudian, ada perubahan komposisi keanggotaan SPI melalui SK Nomor 022/H46/2011 tertanggal 1 Maret 2011 menjadi sepuluh orang. Komposisi keanggotaan SPI yang berlatar belakang akuntansi yang dulunya hanya empat orang bertambah menjadi lima orang, *background* pertanian tetap dua orang tetapi dengan pergantian salah satu personilnya, *background* hukum tetap satu orang dan di tambah dengan ilmu sosial (FISIB) dan Informatika masing-masing satu orang.

Setahun berikutnya tepatnya pada tanggal 3 Februari 2012, Rektor kembali menerbitkan SK Nomor 013/UN46/2012 sebagai konsekuensi dimutasinya ketua SPI pada saat itu yang mengharuskan pucuk pimpinan SPI harus di lanjutkan oleh yang lain. Praktis dengan dimutasinya salah satu anggota SPI saat itu berpengaruh terhadap keanggotaan SPI yang sebelumnya sepuluh orang menjadi sembilan orang.

Tanggal 3 Januari 2013, masa berlaku SK Nomor 013/UN46/2012 telah berakhir dan sebagai gantinya terbitlah SK Nomor 060/UN46/2013. Jika pada SK sebelumnya jumlah anggota SPI berjumlah sembilan orang, maka SK Nomor 060/UN46/2013 semakin mengurangi jumlah anggota SPI menjadi delapan orang dengan masa tugas sampai dengan tahun 2015.

Sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011, maka keberadaan Satuan Pengawasan Intern Perguruan Tinggi Negeri X sudah

di akomodir di dalam draf organisasi dan tata kerja (OTK) Perguruan Tinggi Negeri X yang masih dalam proses pengajuan pengesahan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan Satuan Pengawasan Intern Perguruan Tinggi Negeri X dalam OTK PT X sangat penting sebagai legal formal tentang keberadaan SPI di Perguruan Tinggi Negeri X. Hal ini selain sebagai bentuk kewajiban menjalankan amanat Permendiknas Nomor 11 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kemendiknas juga merupakan bentuk komitmen manajemen tentang pentingnya fungsi pengawasan *intern* di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri X.

Peran dan Fungsi SPI PT X

SPI sebagai auditor internal berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2009 dan diubah menjadi Permendiknas No. 47/2011 Tentang Satuan Pengawasan Intern berfungsi melakukan pengawasan di lingkungan kemendiknas dengan tugasnya a) penyusunan program pengawasan; b) pengawasan kebijakan dan program; c) pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; d) pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; e) pendampingan dan revidi laporan keuangan; f) pemberian saran dan rekomendasi; g) penyusunan laporan hasil pengawasan; serta h) pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.

Dalam pelaksanaannya SPI di Perguruan Tinggi Negeri X masih mencari pola yang tepat dalam melakukan pengawasan untuk menghasilkan kualitas kinerja yang maksimal dalam melaksanakan amanah Permendiknas No. 47/2011 Tentang Satuan Pengawasan Intern. Berikut ini peran yang sudah dilakukan SPI PT X berdasarkan keterangan GA, selaku anggota SPI:

“sejauh ini SPI baru berperan aktif pada tahun 2010. Pada awalnya SPI berusaha mempelajari dan memetakan seperti apa kondisi sesungguhnya di PT X. Oleh karena itu, program audit yang dilaksanakan pada saat itu adalah audit atas laporan pertanggung jawaban (LPJ) unit dan fakultas di lingkungan PT X. Audit atas LPJ ini bertujuan untuk mempelajari alur atau sistem prosedur pelaksanaan penatausahaan di Perguruan Tinggi Negeri X. Dari hasil audit tersebut diketahui terdapat ketidaksamaan penatausahaan antar unit di Perguruan Tinggi Negeri X. Pencarian pola ini dilakukan selama dua tahun yaitu tahun 2010 dan 2011. Berdasarkan evaluasi audit 2010 dan 2011 ternyata akar permasalahan yang terjadi di PT X adalah ketidak sinkronan proses anggaran mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tahun 2012 SPI memutuskan untuk melakukan konfirmasi kepada masing-masing unit dan fakultas. SPI berkoordinasi dengan jajaran dekanat, kepala TU maupun bagian keuangan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai perbedaan yang terjadi untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan akurat dengan melakukan pemeriksaan terhadap petunjuk operasional kegiatan (POK), evaluasi serapan di masing-masing unit sampai pada laporan pertanggung jawabannya. Ternyata ujung permasalahannya yaitu belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi standar baku dalam pelaksanaan aktivitas di PT X” (6/07/2013).

Pernyataan GA tersebut dikuatkan oleh pernyataan TR selaku ketua SPI:

“Proses pengawasan yang dilakukan SPI selama ini berfokus pada audit keuangan, baru semester kedua tahun 2013 SPI melakukan audit pengelolaan BMN karena fenomena menguaknya kasus korupsi terkait pengadaan barang jasa dan kontruksi di lingkungan Perguruan tinggi yang menyeret jajaran pimpinan. Selain itu banyaknya gedung-gedung yang rusak di PT X padahal baru dibangun. Oleh karena itu, SPI berinisiatif dan merancang untuk melakukan audit pengelolaan Barang Milik Negara. Peran SPI yang lain yaitu SPI melakukan pendampingan dan revidi terhadap laporan semesteran dan tahunan Perguruan Tinggi Negeri X, mengevaluasi tindak lanjut terhadap temuan irjen meskipun proses audit oleh irjen, walaupun kapan irjen datang maupun pulang selama ini SPI tidak dilibatkan. Baru tahun 2013 SPI mulai dilibatkan dalam proses audit yang dilakukan Irjen” (6/07/2013).

Kedua pernyataan diatas merupakan gambaran umum peran SPI PT X. Secara umum peran SPI PT X sudah sesuai dengan apa yang menjadi amanat Permendiknas No. 47/2011 walaupun masih ada beberapa yang belum maksimal dilakukan. SPI belum sampai pada taraf *assurance* dalam proses pengawasan yang dilakukan. Pengawasan yang telah dilakukan SPI yaitu pengawasan di bidang keuangan (audit keuangan), pengawasan barang milik negara (audit pengelolaan barang milik negara), pendampingan dan revidu laporan keuangan semesteran dan tahunan universitas, pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan Irjen serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan jika terjadi hal-hal yang menyimpang.

Hal yang belum dilakukan SPI adalah penyusunan program pengawasan, pengawasan kebijakan dan program, pengawasan di bidang kepegawaian serta pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh SPI sendiri. Penyusunan program pengawasan serta pengawasan kebijakan dan program belum dilaksanakan karena SPI masih mencari akar masalah dalam pengelolaan keuangan di PT X sambil mencari pola dan memetakan pengawasan yang tepat yang akan dilakukan SPI. Pengawasan bidang kepegawaian memang belum dilaksanakan oleh SPI karena masih berfokus pada pengawasan laporan keuangan dan baru mulai pengawasan di bidang BMN.

Poin terakhir yang masih belum maksimal dilaksanakan SPI berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan SPI. SPI sifatnya hanya melaporkan dan merekomendasikan terhadap hasil pengawasan yang dilakukan kepada rektor karena rektor sebagai atasan langsung SPI. Laporan dan rekomendasi yang diberikan SPI merupakan wewenang dan hak prerogatif rektor untuk melaksanakan karena rektor merupakan lembaga tertinggi dalam organisasi dan tata kelola (OTK) Perguruan Tinggi Negeri X. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga pengawas untuk mengawasi kebijakan rektor serta mengevaluasi laporan dan rekomendasi yang diberikan SPI. Fungsi lembaga pengawas tersebut sebagai saluran alternatif jika laporan dan rekomendasi yang diberikan SPI tidak ditindak lanjuti oleh rektor. Lembaga pengawas yang dimaksud jika merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum dapat berupa Majelis Wali Amanat (MWA). Majelis Wali Amanat mewakili unsur pemerintah dan masyarakat yang salah tugasnya adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan perguruan tinggi.

Peran dan Fungsi SPI Dalam Pencegahan *Fraud*

Auditor internal memiliki peran yang sangat penting terkait pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Peran dari auditor internal sebagai mitra kerja dari manajemen dalam mengawasi, memantau dan menganalisa aktivitas manajemen serta tempat *sharing* dan konsultasi merupakan kunci penting dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Amrizal (2004) menjelaskan bahwa internal auditor harus memahami *symptom* atau *red flag* dalam melakukan analisis dan evaluasi untuk mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin terjadi serta memahami secara tepat struktur pengendalian *intern* agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya *fraud*. Prinsip dan mekanisme utama pengendalian *intern* yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya *fraud*. Wright (2003), berpendapat bahwa pengendalian *intern* yang efektif mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yang semakin berkurang. Smith et al., (1997), Beasley (1996), Beasley et al., (2000), Reinstein (1998), Matsumura and R. Tucker (1992), dan Abbot et. al., (2002) juga menyatakan bahwa pengendalian *intern* yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Dewi dkk tahun 2012 meneliti tentang gejala *fraud* dan peran auditor internal dalam pendeteksian *fraud* di lingkungan perguruan tinggi (studi kualitatif), hasilnya adalah gejala *fraud* yang berpotensi timbul di lingkungan perguruan tinggi adalah *lack of internal control*.

Berkaitan dengan *fraud*, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2011 secara garis besar mengelompokkan *fraud* dalam tiga kategori yang lebih populer dengan istilah *fraud tree* yaitu *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statements*. Lantas bagaimana peran SPI di Perguruan Tinggi Negeri X selama ini dalam upaya mencegah *fraud*? untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus mengupas kembali apa yang telah dilakukan SPI Perguruan Tinggi Negeri X dalam konteks pencegahan *fraud*.

Berikut ini pernyataan TR selaku ketua SPI:

"...Peran SPI selama ini belum sampai dalam taraf pencegahan *fraud* baik itu korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Pengawasan dan audit yang dilakukan SPI dari tahun 2009-sekarang masih memotret dan mencari pola pengawasan yang tepat" (6/07/2013).

Pernyataan GA, selaku anggota SPI yaitu:

"pengawasan yang dilakukan SPI belum menjamin tidak adanya *fraud*. selain itu SPI belum sampai pada tataran pencegahan *fraud*. Jika kita berbicara pencegahan, maka idealnya dari tahap perencanaan SPI sudah harus dilibatkan dalam proses pengawasannya. Kenyataannya, SPI selama ini masih belum dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran. SPI selama ini hanya melakukan evaluasi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya saja. Dalam siklus anggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban merupakan ujungnya saja. Dan posisi SPI pada saat ini ada pada titik itu. Idealnya memang, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran SPI ada di posisi itu untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Tetapi hal itu belum terjadi. Kemudian dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pembangunan gedung yang begitu banyak mulai dari pembangunan asrama putra-putri, RKB dan lab terpadu selama ini SPI juga tidak pernah dilibatkan dalam pengawasannya. Bagaimana proses lelangnya, siapa saja peserta lelang dan siapa pemenangnya. Pernah pas penyerahan rektorat terpadu yang kita tempati sekarang ini salah seorang pimpinan menelepon pak TR selaku sekretaris SPI pada waktu itu untuk menyaksikan penyerahan rektorat dari vendor kepada PT X. Dan untungnya pak TR berkonsultasi dulu kepada pak rahmat selaku ketua SPI dan atas saran pak rahmat boleh saja pak taufik menyaksikan proses penyerahan rektorat dari pihak vendor kepada PT X, tapi jika diminta tanda tangan apapun baik berita acara penyerahan ataupun apa namanya maka jangan di tanda tangani. Karena SPI tidak dilibatkan dalam prosesnya dan hanya diminta menyaksikan pada saat penyerahan saja. Lagi pula SPI tidak tau apakah prosesnya sesuai dengan aturan, penyerahan barangnya sesuai dengan kontrak dan lain sebagainya" (7/07/2013).

Kedua pernyataan di atas merupakan gambaran tentang peran SPI di PT X dalam pencegahan *fraud*. SPI PT X sejauh ini belum sampai pada taraf pencegahan *fraud*. Hal ini karena SPI PT X peran dan fungsinya belum berperan secara maksimal. Salah satu faktor yang menyebabkan belum berperannya fungsi SPI adalah lingkungan PT X belum mendukung yaitu lingkungan pengendalian dan kurangnya kesadaran manajemen terhadap peran dan fungsi SPI.

Berkaitan dengan pengendalian *intern*, COSO membagi dalam lima komponen pengendalian *intern* yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi *fraud*. Sesungguhnya konsep pengendalian *intern* dalam lima kerangka yang di rekomendasikan oleh COSO merupakan kewajiban manajemen untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud*. Internal auditor hanya sebatas memberikan masukan dan penilaian.

Proses pengawasan dan audit yang dilakukan SPI belum mengarah kepada lima pilar pengendalian *intern* yang di rekomendasikan oleh COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi *fraud*. Audit yang dilakukan SPI masih bersifat audit ketaatan (*compliance test*) serta masih berbasis risiko manajemen keuangan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan SPI terkait pencegahan *fraud* di PT X belum sepenuhnya mengarah kepada pencegahan *fraud*. SPI selama ini sifatnya hanya mengingatkan jika ada indikasi *fraud*, misalnya keterlambatan penyelesaian proyek. Belum maksimalnya peran SPI dalam pencegahan *fraud* di dukung oleh pernyataan GA, salah satu anggota SPI. Berikut petikan hasil pernyataannya:

"SPI dalam proses pengawasan masih dalam tahap membentuk lingkungan pengendalian dan sistem pengendalian *intern* yang memadai. Audit yang dilakukan SPI masih masih tataran audit kepatuhan. Tetapi di satu sisi jika ada indikasi *fraud* maka SPI sudah mengingatkan pimpinan baik melalui lisan maupun laporan (surat)" (7/07/2013).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPI secara peran dan fungsi belum sampai pada taraf pencegahan *fraud*. Belum maksimalnya peran dan fungsi SPI dalam upaya pencegahan *fraud* karena berbagai faktor yaitu:

1. Pengawasan yang dilakukan SPI masih sebatas audit kepatuhan dan dalam rangka menciptakan kesadaran lingkungan pengendalian dalam sistem pengendalian *intern*.
2. Posisi SPI dalam OTK Perguruan Tinggi Negeri X belum memberikan aksesibilitas dan ruang gerak terhadap fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan SPI. SPI tidak dapat menjangkau seluruh elemen dalam level organisasi khususnya kelembagaan universitas (rektorat). Selain itu, penempatan SPI dibawah Pembantu Rektor seakan-akan hubungan dan koordinasi SPI tidak langsung dengan rektor tetapi dibawah rektor. Penempatan posisi SPI stara Unit dan Fakultas menyebabkan *bergaining power* SPI dalam melakukan pengawasan dan monitoring kurang maksimal.
3. Belum adanya Majelis Wali Amanat (MWA) dalam OTK Perguruan Tinggi Negeri X sebagai organ universitas yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum universitas yang mewakili pemerintah dan masyarakat. Keberadaan MWA sebagai organ universitas di atasnya rektor yang bertugas menetapkan kebijakan umum universitas dalam bidang non akademik, mengangkat dan memberhentikan pimpinan, mengesahkan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara umum pengelolaan universitas, serta menyusun dan menyampaikan laporan tahunan bersama pimpinan kepada menteri. Keberadaan MWA sebagai organ tertinggi di universitas sebagai solusi alternatif pengawasan jika pengawasan yang dilakukan SPI belum dilaksanakan oleh pimpinan.
4. Belum independensinya pengelolaan anggaran SPI PT X sebagai unit. Konsekuensi belum di sahkannya OTK Perguruan Tinggi Negeri X oleh Kemendikbud berdampak terhadap pengelolaan anggaran SPI. Selama ini, anggaran SPI PT X masih di jadikan satu dengan anggaran BAUK. Fonomena seperti ini menyebabkan salah satu point dalam standar profesi internal audit yaitu independensi organisasi kurang terjaga. SPI secara kesan akan dianggap kurang independen ketika melakukan pemeriksaan BAUK. Idealnya, internal auditor harus menghindari hal-hal yang mengganggu independensi auditor baik secara fakta maupun kesan.
5. Kedudukan Auditor SPI PT X selama ini masih dari kalangan staf pengajar PT X yang di berikan tugas tambahan untuk menjadi anggota SPI. Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap konflik peran anggota SPI PT X. Konflik peran yang dimaksud adalah peran sebagai anggota SPI PT X (auditor internal) dan peran sebagai staf pengajar di PT X. Konflik peran ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan yang di lakukan SPI PT X. Fungsi pengawasan yang dilakukan SPI tidak maksimal jika kondisi ini terus dibiarkan. Idealnya Auditor SPI PT X di angkat dari pejabat fungsional auditor sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional auditor.

SIMPULAN DN SARAN

Simpulan Penelitian

Simpulan penelitian ini adalah:

1. Proses pengawasan dan audit yang dilakukan SPI belum mengarah kepada lima pilar pengendalian *intern* yang di rekomendasikan oleh COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi *fraud*. Audit yang dilakukan SPI masih bersifat audit ketaatan (*compliance test*) serta masih berbasis risiko manajemen keuangan
2. Peran dan fungsi SPI di PT X dalam pencegahan *fraud* belum sampai pada taraf pencegahan *fraud* karena lingkungan PT X belum mendukung terhadap yaitu lingkungan pengendalian dan kurangnya kesadaran manajemen terhadap peran dan fungsi SPI.
3. Hal hal yang juga menyebabkan belum maksimalnya fungsi SPI yaitu terjadinya konflik peran anggota SPI PT X sebagai anggota SPI dan staf pengajar, belum independensinya pengelolaan anggaran SPI PT X, penempatan posisi SPI PT X dalam OTK belum memberikan *bergaining power* dan aksesibilitas pengawasan yang memadai.

Saran

Saran penelitian ini adalah

1. Hendaknya pengawasan dan audit yang dilakukan SPI diarahkan kepada lima pilar pengendalian *intern* yang di rekomendasikan oleh COSO (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi *fraud*) serta fokus audit yang dilakukan SPI dikembangkan lagi dan tidak hanya bersifat audit ketaatan (*compliance test*).
2. Menciptakan lingkungan pengendalian dan kesadaran manajemen terhadap peran dan fungsi SPI. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan SPI kepada audite.
3. Mengangkat anggota SPI dari auditor fungsional untuk menghindari konflik peran anggota SPI PT X, memberikan independensinya pengelolaan anggaran SPI PT X serta penempatan posisi SPI PT X dalam OTK langsung di bawah rektor untuk memberikan *bergaining power* dan aksebilitas pengawasan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., Susan Parker, and Gary F. Peters, 2002. Audit Committee Characteristics and Financial Statement: A Study of the Efficacy of Certain Blue Ribbon Committee Recommendation.
- Amrizal. 2004. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/cegah_deteksi.pdf.
- Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE). 2011. *Fraud* Examiners Manual. USA
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya. Insan Cendekia
- Beasley, M. S., 1996. An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement *Fraud*. *The Accounting Review*. vol. 71 no. 4 (Oct.). Pp: 443-465.
- Beasley M.S., J.V. Carcello, Hermanson and P.D. Lapedes. 2000. *Fraudulent* financial reporting: consideration of industry traits and corporate Governance Mechanisms, *Accounting Horizons*. Vol. 14. Pp. 441–454 (December).
- Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Burnaby, Priscilla, Martha Howe and Brigitte W. Muehlmann. Detecting Fraud in the Organization: An Internal Audit Perspective. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*. Vol. 3, Issue 1
- Chariri, Anis. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Paper. Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus
- Fikri, Ali, Made Sudarma, Eko Ganis Sukoharsono dan Bambang Purnomosidhi. 2011. *Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization WWF (World Wide Fund for Nature)*. *Jurnal Universitas Barawijaya*. <http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/32804/1/STUDI-FENOMENOLOGI-AKUNTABILITAS-NON-GOVERMENTAL-ORGANIZATION-WWF-%28WORLD-WIDE-FUND-for-NATURE%29.doc>.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta. Salemba Humanika.

- Indriantoro, Nur dan Bambang, Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPF. Yogyakarta.
- Intosai. 1992. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. <http://www.idkk.gov.tr/Site/Dokumanlari/Yayinlar/INTOSAI.pdf>. Diakses 29 23 Oktober 2013.
- Irjen Kemendikbud. 2010. Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Komprehensif Pada Perguruan Tinggi Negeri X Tahun 2010.
- _____. 2011. Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan komprehensif pada Perguruan Tinggi Negeri X Tahun 2011
- _____. 2012. Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan komprehensif pada Perguruan Tinggi Negeri X Tahun 2012
- Jurnal Online (<http://www.itoday.co.id/> politik/perguruan-tinggi-negeri-candradimuka-koruptor) diakses 12 Agustus 2012
- Jurnal Transparansi Vol. 5 No. 1 Tahun 2010. Paradigma Pengawasan *Intern* dari Wachdog Menuju Quality Assurance.
- Matsumura, E. M., and Robert R. Tucker, 1992. Fraud detection: A Theoretical Foundation. *The Accounting Review*, vol. 67 no. 4.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- _____. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Reinstein, A., and Bayou, M.E., 1998. A Comprehensive Structure to Help Analyse, Detect and Prevent Fraud.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Buku 2 Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*. VOL. 9, NO. 2, Desember 2005: 57-65
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Smith, R., Sam Tiras, and Stan Vichitlekarn, 1997. The Interaction Between Internal Control Assessment and Substantive Testing in Audits for Fraud.
- Tempo, Edisi 09 Nopember 2012, e-newspaper: www.tempo.com. Di akses 02 Februari 2013
- The Institute of Internal Auditors. 2009. *Guide to Internal Auditing*, Second Edition.
- Wright, Patrick M., 2003. Restoring Trust: The Role of HR in Corporate Governance.
- YPIA. 2008. *Fondasi Internal Audit*. Jakarta. Yayasan Pendidikan Internal Audit
- _____. 2010. Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan komprehensif pada Perguruan Tinggi Negeri X Tahun 2010
- _____. 2010. Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan komprehensif pada Perguruan Tinggi Negeri X Tahun 2012
- Wright, Patrick M., 2003. Restoring Trust: The Role of HR in Corporate Governance.
- YPIA. 2008. *Fondasi Internal Audit*. Jakarta. Yayasan Pendidikan Internal Audit.

Lampiran

Tabel. 1
Perubahan Paradigma Internal Audit

No	Uraian	Paradigma Lama	Paradigma Baru
1	Peran	Watchdog	Konsultan dan katalis
2	Pendekatan	Detektif (mendeteksi masalah)	Preventif (pencegahan masalah)
3	Sikap	Bertindak seperti polisi	Sebagai mitra
4	Ketaatan/ kepatuhan	Terhadap semua kebijakan	Hanya kebijakan yang relevan
5	Fokus	Kelemahan/ penyimpangan	Penyelesaian yang konstruktif
6	Komunikasi dengan Manajemen	Terbatas	Reguler

Sumber: Majalah Transparansi Vol. 5/No. 1/ 2010

Tabel 2

Hasil Audit Irjen Kemendikbud atas Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri X Tahun 2010- 2012

No	Temuan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2011
1	Kasus yang merugikan Negara	-	1 Kasus	-
2	Kasus berkaitan dengan kewajiban penyeteroran kepada kas negara	3 Kasus	1 Kasus	5 Kasus
3	Kasus berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku	7 Kasus	7 Kasus	6 Kasus
4	Kasus berkaitan dengan pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan	10 Kasus	11 Kasus	-
5	Kasus berkaitan dengan hambatan terhadap kelancaran tugas pokok	10 Kasus	8 Kasus	-
6	Kasus berkaitan dengan hambatan terhadap kelancaran kegiatan	-	1 Kasus	-
7	Kasus berkenaan dengan kelemahan administrasi, tata usaha akuntansi	3 Kasus	11 Kasus	1 Kasus
8	Kasus berkaitan dengan pemeriksaan lainnya	1 Kasus	-	-
JUMLAH		34 Kasus	40 Kasus	12 Kasus

Sumber: Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Komprehensif Irjen Kemendikbud pada Perguruan Tinggi Negeri X Tahun 2010, 2011 dan 2012

